



Ruang Publik Deliberatif Dalam Komunikasi Pembangunan Perkotaan: Studi Taman Kota Di Jakarta Selatan Dalam Perspektif Jürgen Habermas

Albi Mushaffa¹, Muhammad Alviansyah Prasetyo², Rifma Ghulam Dzaljad³

^{1,2,3} Program Studi Ilmu Komunikasi, Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka, Jakarta, Indonesia

Article Info

Article history:

Received Juli 5, 2026

Revised Juli 5, 2026

Accepted Juli 5, 2026

Kata Kunci:

Public Sphere,
Jürgen Habermas,
Komunikasi Pembangunan,
Ruang Publik Perkotaan,
Taman Bendera Pusaka.

Keywords:

Public Sphere,
Jürgen Habermas,
Development Communication,
Urban Public Space,
Taman Bendera Pusaka.

ABSTRAK

Artikel ini mengkaji kesenjangan antara konsep ruang publik ideal Jürgen Habermas dengan realitas Taman Bendera Pusaka di Jakarta Selatan sebagai arena deliberasi publik melalui analisis wacana media sosial dan wawancara dengan pengelola serta pengunjung taman. Berbasis analisis terhadap sumber utama Raymond Geuss, *The Idea of a Critical Theory: Habermas and the Frankfurt School*, dan J. Robert Cox serta Phaedra C. Pezzullo, *Environmental Communication and the Public Sphere*, artikel ini menelaah bagaimana kerangka teoritis Habermas dapat menjadi landasan konseptual bagi evaluasi kritis ruang publik perkotaan. Taman Bendera Pusaka merupakan hasil revitalisasi yang menggabungkan tiga taman ikonik di Kebayoran Baru, yaitu Taman Langsung, Taman Ayodya, dan Taman Leuser, menjadi satu kawasan ruang terbuka hijau terpadu seluas 5,5 hektare yang diresmikan pada Maret 2026. Dengan menggunakan metode kualitatif melalui analisis konten media sosial, observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi, penelitian ini menganalisis empat dimensi kritis ruang publik Habermas. Temuan menunjukkan bahwa Taman Bendera Pusaka telah mengalami kemajuan signifikan dalam aspek inklusivitas dan ketersediaan fasilitas publik. Namun, masih ditemukan kesenjangan dalam kualitas interaksi komunikatif yang cenderung bersifat rekreatif daripada deliberatif, partisipasi publik yang terbatas pada tahap konsultasi bukan deliberasi substantif, serta adanya indikasi kolonisasi ruang publik oleh kepentingan politik dan ekonomi. Artikel ini menyimpulkan bahwa revitalisasi taman kota perlu diiringi dengan penguatan fungsi public sphere melalui program program diskursif dan mekanisme partisipasi publik yang lebih substantif.

ABSTRACT

*This article examines the gap between Jürgen Habermas's ideal concept of the public sphere and the reality of Taman Bendera Pusaka in South Jakarta as an arena for public deliberation through social media discourse analysis and interviews with park managers and visitors. Based on an analysis of primary sources, Raymond Geuss's *The Idea of a Critical Theory: Habermas and the Frankfurt School* and J. Robert Cox and Phaedra C. Pezzullo's *Environmental Communication and the Public Sphere*, this article explores how Habermas's theoretical framework can serve as a conceptual foundation for the critical evaluation of urban public spaces. Taman Bendera Pusaka is the result of revitalization that combines three iconic parks in Kebayoran Baru, Taman Langsung, Taman Ayodya, and Taman Leuser, into an integrated 5.5 hectare green open space area inaugurated in March 2026. Using qualitative methods through social media content analysis, observation, in-depth interviews, and documentation, this study analyzes four critical dimensions of Habermas's public sphere. The findings indicate that Taman Bendera Pusaka has made significant progress in terms of inclusivity and the availability of public facilities. However, gaps remain in the quality of communicative interaction, which tends to be recreational rather than*

deliberative, limited public participation at the consultation stage rather than substantive deliberation, and indications of the colonization of public space by political and economic interests. This article concludes that park revitalization must be accompanied by strengthening the public sphere function through discursive programs and more substantive public participation mechanisms.

This is an open access article under the [CC BY](#) license



Corresponding Author:

Albi Mushaffa
Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Ilmu Komunikasi, Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka.
Jakarta, Indonesia
Email: albimushaffa5@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Pembangunan perkotaan di Indonesia, khususnya di Jakarta, tidak pernah bisa dilepaskan dari komunikasi. Pembangunan bukanlah semata proses teknis pemindahan sumber daya atau pertumbuhan ekonomi fisik, melainkan sebuah proses sosial yang sarat dengan negosiasi makna, kepentingan, dan relasi kuasa [1]. Dalam konteks Jakarta Selatan sebagai salah satu wilayah dengan kepadatan penduduk tinggi dan pusat aktivitas ekonomi, pertanyaan tentang bagaimana ruang publik dibangun, siapa yang memiliki akses ke dalamnya, dan sejauh mana ruang tersebut memfasilitasi deliberasi demokratis menjadi semakin mendesak untuk dikaji.

Pembangunan ruang terbuka hijau di Jakarta Selatan merupakan salah satu wujud kebijakan pembangunan perkotaan yang bertujuan menyediakan ruang bagi interaksi sosial warga [2]. Berdasarkan data, Jakarta Selatan menyumbang 25 persen dari total luas ruang terbuka hijau DKI Jakarta, dengan 780 taman yang mencakup 45 persen dari total taman di DKI Jakarta [2]. Taman-taman seperti Taman Mataram, Taman Langsat, dan Tebet Ecopark menjadi contoh ruang publik yang disediakan pemerintah untuk akses masyarakat umum [3]. Namun, penelitian awal menunjukkan bahwa keberadaan taman-taman tersebut belum sepenuhnya dapat menunjukkan hakikatnya sebagai ruang publik deliberatif [4].

Permasalahan yang mendasari penelitian ini adalah adanya kesenjangan antara idealitas ruang publik sebagai arena deliberasi yang bebas dominasi dengan realitas taman kota di Jakarta Selatan yang cenderung mengalami komodifikasi, eksklusivitas, dan minimnya partisipasi publik yang substantif. Di Taman Langsat sebelum revitalisasi, taman ini mengalami penurunan fungsi selama lebih dari sepuluh tahun dengan minimnya tanda penunjuk arah, orientasi taman yang tertutup, sirkulasi yang belum berkeadilan, serta penggunaan sudut taman sebagai tempat bermalam oleh pengamen dan anak jalanan [4]. Demikian pula, revitalisasi Taman Mataram di Kebayoran Baru yang dilakukan pada tahun 2019 masih ditemukan permasalahan terkait penyediaan fasilitas dan kenyamanan pengunjung yang belum memenuhi kriteria ruang publik berkualitas [5].

Perkembangan terbaru yang menjadi fokus penelitian ini adalah revitalisasi kawasan Barito, Kebayoran Baru, yang menghadirkan Taman Bendera Pusaka, sebuah kawasan ruang terbuka hijau terpadu hasil penggabungan tiga taman eksisting, yaitu Taman Langsat, Taman Ayodya, dan Taman Leuser, menjadi satu kesatuan ruang terbuka hijau seluas 5,5 hektare [6]. Taman ini diresmikan oleh Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung pada 14 Maret 2026 dan dirancang oleh arsitek Yori Antar dengan filosofi Sang Saka Merah Putih, membagi area menjadi Zona Merah yang bersifat aktif dan dinamis serta Zona Putih yang bersifat tenang dan reflektif [7]. Kehadiran Taman Bendera Pusaka menimbulkan berbagai respons di masyarakat, baik melalui kunjungan langsung maupun melalui

diskusi di media sosial. Fenomena ini menjadi penting untuk dikaji dari perspektif komunikasi pembangunan dan teori ruang publik Habermas.

Di sinilah pemikiran Jürgen Habermas menemukan relevansinya yang melampaui ranah filsafat semata. Habermas sebagai penerus generasi kedua Mazhab Frankfurt membangun kerangka teori kritis yang berusaha menjawab pertanyaan mendasar tentang bagaimana masyarakat dapat mencapai konsensus yang rasional dan bebas dari paksaan. Raymond Geuss [9] dalam *The Idea of a Critical Theory* mengidentifikasi tiga ciri utama teori kritis, yaitu teori kritis memiliki kedudukan khusus sebagai panduan tindakan karena bersifat reflektif, teori kritis bertujuan menghasilkan pencerahan bagi para agen, dan teori kritis bersifat emansipatoris karena membebaskan dari bentuk bentuk paksaan.

Sementara itu, Cox dan Pezzullo [1] dalam *Environmental Communication and the Public Sphere* memberikan jembatan operasional antara teori Habermas dengan praktik advokasi lingkungan dan pembangunan. Mereka mendefinisikan ruang publik sebagai forum dan interaksi di mana individu yang berbeda saling berdiskursus tentang isu-isu yang menjadi perhatian bersama, dari lingkup lingkungan sekitar hingga relasi internasional [1]. Kerangka ini membuka peluang untuk memahami ruang publik taman kota bukan semata sebagai ruang fisik, melainkan sebagai arena diskursus yang seharusnya memfasilitasi deliberasi publik.

Artikel ini bertujuan menganalisis pemikiran Habermas sebagaimana dikritisi Geuss [9], memperkayanya dengan perspektif komunikasi lingkungan Cox dan Pezzullo [1], serta mengkontekstualisasikannya dalam studi kasus Taman Bendera Pusaka di Jakarta Selatan melalui analisis wacana media sosial dan wawancara dengan pengelola serta pengunjung taman. Objek penelitian adalah Taman Bendera Pusaka yang merupakan hasil revitalisasi dan penggabungan Taman Langsung, Taman Ayodya, dan Taman Leuser di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, dengan fokus pada aspek aksesibilitas dan inklusivitas taman bagi berbagai lapisan masyarakat, kualitas interaksi komunikatif yang terjadi di dalam taman, tingkat partisipasi publik dalam perencanaan dan pengelolaan taman, serta derajat kebebasan dari dominasi kepentingan politik dan ekonomi..

2. METODE

Pada Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Objek penelitian adalah Taman Bendera Pusaka di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, sebuah kawasan ruang terbuka hijau terpadu hasil penggabungan tiga taman eksisting, yaitu Taman Langsung, Taman Ayodya, dan Taman Leuser, yang diresmikan pada Maret 2026 [7].

2.1 Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara Mendalam dengan pengelola Taman Bendera Pusaka (3 informan), pengunjung taman (15 informan yang terdiri dari berbagai latar belakang usia dan pekerjaan), dan perangkat kelurahan setempat (2 informan). Wawancara dilakukan untuk menggali persepsi, pengalaman, dan pemahaman informan tentang fungsi taman sebagai ruang publik.
2. Analisis Konten Media Sosial pada platform Instagram (akun resmi @tamanbenderapusaka dan unggahan dengan tagar #TamanBenderaPusaka) serta X/Twitter (cuitan dengan kata kunci "Taman Bendera Pusaka"). Periode analisis adalah Maret sampai Mei 2026 (3 bulan sejak peresmian). Unit analisis sebanyak 120 unggahan atau komentar yang dipilih secara purposif berdasarkan relevansi dan variasi respons. Fokus analisis meliputi konten visual (foto dan video), caption, dan tanggapan pengunjung atau netizen.
3. Observasi Partisipatif yang dilakukan pada jam dan hari yang berbeda, yaitu pagi, siang, sore, hari kerja, dan akhir pekan, selama periode Maret sampai Mei 2026. Observasi dilakukan untuk mengamati pola interaksi, aktivitas, dan pemanfaatan ruang taman.
4. Dokumentasi berupa foto dan video aktivitas di taman serta tangkapan layar unggahan media sosial.

5. Studi Literatur untuk mengkaji kebijakan tata ruang, dokumen perencanaan taman, siaran pers resmi Pemprov DKI Jakarta (2025), dan laporan media tentang revitalisasi Taman Bendera Pusaka.

2.2 Analisis Data

Analisis data menggunakan model interaktif Miles dan Huberman dengan kerangka analisis berbasis empat kondisi ideal situasi tutur Habermas [9], yaitu kesempatan yang sama untuk memulai dan melanjutkan diskursus, kesempatan yang sama untuk mempersoalkan dan menjelaskan pernyataan, kesempatan yang sama untuk mengekspresikan sikap dan niat, serta kesempatan yang sama untuk memerintah, menolak, dan menerapkan norma. Data wawancara dan media sosial dianalisis secara tematik untuk mengidentifikasi pola-pola yang menunjukkan pemenuhan atau pelanggaran terhadap keempat kondisi tersebut.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Aksesibilitas dan Inklusivitas Taman Bendera Pusaka

Situasi Ideal (Habermas): Ruang publik harus terbuka bagi semua warga tanpa diskriminasi berdasarkan status sosial, ekonomi, atau politik [10]. Setiap individu memiliki hak yang sama untuk mengakses, menggunakan, dan berpartisipasi dalam ruang publik. Habermas menekankan bahwa ruang publik yang ideal adalah ruang yang diciptakan secara mandiri, terpisah dari negara dan pasar [11].

1. Data Wawancara:

Informan 1 (Pengelola Taman, usia 35 tahun) menyatakan bahwa Taman Bendera Pusaka dirancang untuk semua kalangan dengan menyediakan fasilitas untuk anak-anak, dewasa, dan lansia. Pengelola juga menyediakan jalur ramah disabilitas dan area parkir yang cukup luas. Taman buka 24 jam sehingga masyarakat bisa datang kapan saja.

Informan 2 (Pengunjung, ibu rumah tangga, usia 42 tahun) mengungkapkan bahwa ia senang taman ini sekarang lebih tertata rapi. Dulu Taman Langsung kotor dan banyak gelandangan, tetapi sekarang lebih bersih dan nyaman untuk membawa anak-anak.

Informan 3 (Pengunjung, pelajar, usia 19 tahun) menyebutkan bahwa aksesnya mudah karena dekat MRT Blok M. Namun, ia melihat masih banyak area yang didominasi oleh komunitas tertentu, terutama di zona merah pada sore hari, sehingga kadang ia merasa sungkan untuk menggunakan fasilitas di sana. Informan 4 (Pengelola, usia 40 tahun) mengakui bahwa ada upaya dari pihak pengelola untuk mengatur pemanfaatan ruang agar tidak terjadi okupansi berlebihan. Namun, tantangannya besar karena taman ini terbuka 24 jam.

Informan 5 (Pedagang yang direlokasi, usia 50 tahun) menceritakan bahwa sebelumnya ia berjualan di kawasan Barito. Sekarang ia direlokasi ke pasar yang disediakan pemerintah. Ia bersyukur mendapatkan tempat baru, tetapi prosesnya terasa mendadak dan tanpa diskusi panjang.

2. Data Media Sosial:

Akun Instagram @tamanbenderapusaka mengunggah konten promosi fasilitas taman pada 20 Maret 2026. Unggahan tersebut menerima 1.240 suka dan 340 komentar. Beberapa komentar netizen menunjukkan respons positif. Salah satu komentar berbunyi, "Akhirnya taman yang layak di Jaksel! Fasilitasnya lengkap, gratis pula." Komentar lain menyatakan, "Fasilitas oke, tapi sayang beberapa area masih didominasi oknum tertentu." Ada juga yang berkomentar, "Tolong jaga kebersihan dan keamanan ya. Jangan sampai jadi tempat nongkrong malam yang meresahkan."

Analisis: Temuan ini menunjukkan bahwa Taman Bendera Pusaka telah mencapai kemajuan dalam aspek inklusivitas fisik dan aksesibilitas, sebagaimana tercermin dalam penyediaan fasilitas untuk berbagai kelompok dan pernyataan pengelola (Informan 1). Namun, dimensi inklusivitas sosial ekonomi masih memerlukan perhatian lebih lanjut. Proses relokasi pedagang (Informan 5) menunjukkan bahwa partisipasi publik dalam pengambilan keputusan relokasi masih terbatas. Selain itu, adanya okupansi

ruang oleh kelompok tertentu (Informan 3 dan komentar netizen) menunjukkan bahwa akses yang setara secara teoritis belum sepenuhnya terwujud dalam praktik. Hal ini sejalan dengan temuan penelitian tentang Taman O di Cibubur yang mengidentifikasi bahwa prinsip inklusivitas ruang publik Habermas belum sepenuhnya terpenuhi karena warga masih terkendala birokrasi dan keterbatasan waktu pemanfaatan taman [12]. Kesenjangan ini menunjukkan bahwa syarat pertama situasi tutur ideal Habermas, yaitu kesempatan yang sama untuk memulai dan melanjutkan diskursus, belum sepenuhnya terpenuhi.

3.2 Kualitas Interaksi Komunikatif di Taman Bendera Pusaka

Situasi Ideal (Habermas): Ruang publik harus menjadi arena diskursus di mana warga dapat saling bertukar pikiran, berdialog, dan membangun pemahaman yang sama secara rasional [13]. Tindakan komunikatif adalah tindakan yang mengarahkan diri pada konsensus melalui diskursus praktis [14].

1. Data Wawancara:

Informan 6 (Pengunjung, pekerja swasta, usia 28 tahun) mengatakan bahwa ia ke taman biasanya untuk berlari dan bersantai. Kadang bertemu teman dan mengobrol santai, tetapi belum pernah melihat adanya diskusi serius tentang isu kota atau lingkungan di sini.

Informan 7 (Pengunjung, mahasiswa, usia 22 tahun) mengungkapkan bahwa ia dan teman-teman sering ke taman ini. Mereka pernah berdiskusi tentang proyek taman ini di amphitheater, tetapi itu karena mereka yang berinisiatif sendiri. Dari pengelola belum ada program diskusi publik.

Informan 8 (Pengelola, usia 38 tahun) menyatakan bahwa pihak pengelola menyediakan amphitheater dan ruang ekspresi seni. Namun, untuk kegiatan diskusi publik, belum ada program rutin. Yang ada biasanya kegiatan olahraga dan seni budaya.

Informan 9 (Pengunjung, pensiunan, usia 65 tahun) menyebutkan bahwa ia datang pagi-pagi untuk senam. Banyak yang saling kenal di sini. Mereka mengobrol tentang taman, tentang kesehatan, dan kadang tentang politik juga. Tetapi itu sekadar obrolan, tidak sampai ada forum resmi.

2. Data Media Sosial:

Pada 2 April 2026, akun @tamanbenderapusaka mengunggah video fasilitas amphitheater dengan caption, "Tempatnya nyaman buat kegiatan seni dan komunitas, nih! Mau ngadain acara di sini? Hubungi pengelola ya! #TamanBenderaPusaka #RuangKreatif"

Unggahan ini menerima 890 suka dan 210 komentar. Beberapa komentar menunjukkan harapan akan fungsi diskursif taman. Salah satu komentar berbunyi, "Bagus banget amphitheaternya! Semoga bisa dipakai untuk diskusi publik, bukan cuma buat pertunjukan musik." Komentar lain menyatakan, "Fasilitasnya keren, tapi sayang belum ada program diskusi rutin dari pemerintah. Taman publik harusnya jadi tempat warga ngobrolin isu kota." Ada juga yang berkomentar, "Dulu di Taman Langsung ada komunitas yang ngadain diskusi lingkungan. Sekarang setelah direvitalisasi, komunitasnya bubar. Mudah mudahan ke depannya ada ruang buat itu lagi."

Analisis: Temuan ini menunjukkan bahwa interaksi di Taman Bendera Pusaka masih didominasi oleh aktivitas rekreatif dan olahraga. Meskipun tersedia amphitheater dan ruang ekspresi seni yang berpotensi untuk kegiatan diskursif, pemanfaatannya untuk deliberasi publik masih terbatas (Informan 7, Informan 8). Hal ini mencerminkan apa yang disebut Habermas sebagai kolonisasi dunia kehidupan oleh logika sistem [11]. Taman kota yang seharusnya menjadi ruang bagi pembentukan opini publik justru direduksi menjadi ruang konsumsi dan rekreasi semata. Penelitian tentang warung kopi di Mampang Jakarta Selatan menunjukkan bahwa ruang publik informal dapat menjadi arena inklusif dan terbuka di mana norma saling menghormati, keterbukaan, kesederhanaan, dan kerja sama komunitas dipelihara [15]. Namun, temuan ini belum terlihat secara signifikan di Taman Bendera Pusaka. Kesenjangan ini menunjukkan bahwa syarat kedua dan ketiga situasi tutur ideal Habermas, yaitu kesempatan yang sama untuk mempersoalkan pernyataan dan mengekspresikan sikap, belum

sepenuhnya terpenuhi. Minimnya program diskusi publik yang terencana dari pengelola semakin memperkuat temuan ini.

3.3 Partisipasi Publik dalam Perencanaan dan Pengelolaan

Situasi Ideal (Habermas): Demokrasi deliberatif menuntut keterlibatan masyarakat dalam perencanaan dan pengambilan keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka [14]. Masyarakat diminta untuk melakukan proses komunikasi secara terbuka dan setara serta menggunakan pendekatan musyawarah dalam mencapai konsensus. Opini yang dibangun harus menghargai pendapat minoritas maupun mayoritas [14].

1. Data Wawancara:

Informan 10 (Pengelola, usia 45 tahun) menyatakan bahwa proses pembangunan taman ini tidak menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, melainkan kerja sama dengan pihak swasta (PT Wisma Nusantara International). Perencanaan melibatkan arsitek dan tim perancang. Untuk keterlibatan masyarakat, pengelola belum melakukan musyawarah publik secara formal.

Informan 11 (Perangkat Kelurahan, usia 50 tahun) mengatakan bahwa pihak kelurahan dilibatkan dalam koordinasi teknis. Tetapi untuk proses perencanaan secara keseluruhan, mereka hanya menerima informasi dari tingkat provinsi. Tidak ada forum diskusi dengan warga sebelum pembangunan.

Informan 12 (Pengunjung, aktivis lingkungan, usia 30 tahun) mengungkapkan kekecewaannya karena proses revitalisasi ini tidak melibatkan komunitas komunitas yang dulu aktif di Taman Langsung. Mereka baru tahu setelah pembangunan hampir selesai.

Informan 13 (Pengunjung, warga sekitar, usia 55 tahun) mengatakan bahwa ia tinggal dekat sini sejak lama. Tidak ada sosialisasi yang jelas dari pemerintah. Tiba tiba taman sudah dibangun. Memang hasilnya bagus, tetapi prosesnya kurang transparan.

2. Data Media Sosial:

Pada 5 Maret 2026 sebelum peresmian, seorang netizen mengunggah foto proyek pembangunan taman di platform X dengan caption, "Progres Taman Bendera Pusaka. Siapa yang tahu ini dibangun dengan dana dari mana? Kok kayaknya tidak ada sosialisasi ke warga sekitar ya?"

Cuitan tersebut mendapat 1.500 tampilan, 120 suka, dan 45 balasan. Beberapa balasan menunjukkan keresahan serupa. Salah satu balasan berbunyi, "Setahu saya ini kerja sama swasta. Tapi ya gitu, warga tidak diajak ngobrol." Balasan lain menyatakan, "Pemerintah sering banget begini. Bangun taman bagus tapi tanpa melibatkan warga. Nanti hasilnya bagus, tapi warga tidak punya rasa memiliki." Ada juga yang berkomentar, "Padahal kalau warga dilibatkan, taman ini akan lebih terawat dan fungsional karena ada rasa kepemilikan."

Namun, ada juga balasan yang mendukung pendekatan pemerintah, "Yang penting hasilnya bagus dan bisa dinikmati warga. Daripada taman kumuh seperti dulu."

Analisis: Temuan ini menunjukkan bahwa partisipasi publik dalam perencanaan dan pengelolaan Taman Bendera Pusaka masih sangat terbatas. Proses perencanaan melibatkan pemerintah dan pihak swasta tanpa mekanisme partisipasi publik yang jelas (Informan 10, Informan 11). Hal ini berpotensi menimbulkan apa yang oleh Habermas (1987) disebut sebagai kolonisasi ruang publik oleh kepentingan ekonomi. Sebagaimana diakui dalam analisis wacana ruang publik, dalam aspek implementatif belum sepenuhnya mampu mengelaborasi *public space* yang juga menjadi *public sphere* sehingga membutuhkan perencanaan perencanaan untuk mematangkan aspek *public sphere* agar terbentuk suatu ekosistem di mana diskursus dan kritik terjadi di dalam ruang tersebut (Repository UIN Jakarta, 2024, hlm. 56). Kesenjangan ini menunjukkan bahwa syarat keempat situasi tutur ideal Habermas, yaitu kesempatan yang sama untuk memerintah, menolak, dan menerapkan norma, belum sepenuhnya

terpenuhi. Masyarakat tidak memiliki kesempatan yang setara untuk mempengaruhi keputusan yang berdampak pada kehidupan mereka, terutama para pedagang yang direlokasi (Informan 5).

2.4 Dominasi Kepentingan Politik dan Ekonomi

Situasi Ideal (Habermas): Ruang publik harus bebas dari dominasi kekuasaan, baik kekuasaan politik (negara) maupun kekuasaan ekonomi (pasar) [11]. Ruang publik diciptakan secara mandiri, terpisah dari intervensi negara dan kepentingan komersial [10].

1. Data Wawancara:

Informan 14 (Pengelola, usia 42 tahun) menyatakan bahwa taman ini didanai oleh kerja sama dengan pihak swasta. Pengelola menyadari bahwa model ini bisa menimbulkan persepsi tentang dominasi ekonomi. Namun, pengelola memastikan bahwa semua fasilitas taman tetap gratis dan terbuka untuk publik.

Informan 15 (Pengunjung, pekerja seni, usia 27 tahun) mengungkapkan bahwa ia senang ada ruang seni di sini. Namun, ia khawatir jika ke depannya taman ini digunakan untuk kepentingan politik tertentu, misalnya kampanye atau acara partai. Taman publik seharusnya netral.

Informan 16 (Pengunjung, akademisi, usia 40 tahun) berpendapat bahwa penamaan Bendera Pusaka memiliki konotasi politik dan sejarah yang sangat kuat. Ini bukan sekadar taman, ini adalah medium politik identitas. Ia tidak mengatakan itu buruk, tetapi masyarakat perlu kritis terhadap fungsi simbolis yang disematkan pada ruang publik.

Informan 17 (Perangkat Kelurahan, usia 48 tahun) mengatakan bahwa nama taman ini dipilih langsung oleh gubernur. Pihak kelurahan hanya mengikuti arahan dari pusat. Namun, nama ini memang sarat makna kebangsaan.

2. Data Media Sosial:

Pada 15 Maret 2026 sehari setelah peresmian, akun Instagram resmi @tamanbenderapusaka mengunggah foto peresmian yang menampilkan Gubernur Pramono Anung bersama para pejabat dengan caption, "Taman Bendera Pusaka resmi dibuka untuk masyarakat! Semoga menjadi ruang publik yang membanggakan dan menginspirasi semangat kebangsaan ID #TamanBenderaPusaka #JakartaKotaGlobal"

Unggahan ini menerima 2.100 suka dan 450 komentar. Beberapa komentar menunjukkan kritik terhadap politisasi taman. Salah satu komentar berbunyi, "Bagus tanamannya, tapi kenapa harus pakai nama bendera? Apa hubungannya taman sama bendera? Ini politik identitas ya." Komentar lain menyatakan, "Nama taman ini sarat kepentingan politik. Kenapa tidak pakai nama yang lebih netral, seperti Taman Barito saja?" Ada juga yang berkomentar, "Simbolisme bendera memang penting, tapi hati hati jangan sampai ruang publik menjadi alat propaganda politik."

Namun, tidak sedikit juga komentar yang mendukung penamaan tersebut, seperti "Nama Bendera Pusaka bagus! Mengingat kita pada perjuangan bangsa. Taman ini bukan sembarang taman."

Analisis: Temuan ini menunjukkan adanya indikasi dominasi kepentingan politik dan ekonomi dalam pengelolaan Taman Bendera Pusaka. Penamaan Bendera Pusaka yang dipilih langsung oleh gubernur dan dikaitkan dengan semangat kebangsaan (Informan 17, Informan 14) menunjukkan adanya upaya untuk mengkonstruksi ruang publik sebagai medium politik identitas. Sebagaimana dikemukakan oleh Informan 16, ini bukan sekadar taman, melainkan medium politik identitas. Model pendanaan taman yang melibatkan pihak swasta (Informan 14) juga berpotensi menimbulkan komodifikasi ruang publik, meskipun fasilitasnya tetap gratis.

Fenomena ini mencerminkan apa yang oleh Habermas [11] disebut sebagai kolonisasi ruang publik oleh logika sistem, di mana mekanisme pasar dan birokrasi negara mengambil alih domain komunikasi autentik. Taman kota yang seharusnya menjadi arena deliberasi publik yang bebas dominasi justru

berpotensi menjadi instrumen politik identitas dan kepentingan ekonomi. Kritik netizen terhadap politisasi taman semakin menguatkan temuan ini.

2.5 Ruang Publik Digital: Analisis Media Sosial Taman Bendera Pusaka

Selain sebagai ruang fisik, Taman Bendera Pusaka juga menjadi subjek diskusi di ruang publik digital. Analisis terhadap konten media sosial menunjukkan beberapa pola menarik.

1. Dominasi Konten Visual dan Promosi

Dari 60 unggahan di akun @tamanbenderapusaka selama periode Maret sampai Mei 2026, mayoritas (75 persen) berupa konten visual yang menampilkan keindahan taman dan fasilitasnya. Caption yang digunakan cenderung bersifat promosi dan informatif, bukan diskursif. Hal ini menunjukkan bahwa akun resmi taman berfungsi sebagai alat promosi dan pencitraan ketimbang sebagai arena deliberasi publik.

2. Partisipasi Netizen

Dari 340 komentar pada unggahan paling populer, hanya 12 persen yang mengandung kritik substantif terhadap kebijakan atau pengelolaan taman. Sebagian besar komentar (65 persen) bersifat apresiatif dan positif, sementara sisanya (23 persen) berisi pertanyaan teknis dan informasi. Rendahnya proporsi komentar kritis menunjukkan bahwa ruang publik digital belum dimanfaatkan secara optimal sebagai arena deliberasi.

3. Respons terhadap Isu Kontroversial

Ketika isu relokasi pedagang dan politisasi taman muncul di media sosial, respons dari akun resmi sangat minim. Hanya ada 2 unggahan yang secara implisit merespons kritik netizen. Ketiadaan respons substantif ini memperkuat temuan tentang minimnya ruang deliberatif di Taman Bendera Pusaka, baik secara fisik maupun digital.

Analisis: Analisis media sosial memperkuat temuan dari wawancara dan observasi. Distorsi komunikasi dalam ruang publik digital Taman Bendera Pusaka terjadi melalui mekanisme dominasi konten promosi yang membatasi ruang diskusi kritis, minimnya respons pengelola terhadap kritik publik, dan kecenderungan netizen untuk mengonsumsi konten secara pasif tanpa membangun argumentasi yang substansial.

4. KESIMPULAN

Pemikiran Jürgen Habermas tentang public sphere dan tindakan komunikatif, sebagaimana dieksposisikan Geuss [9] dan diperkaya dengan perspektif komunikasi lingkungan Cox dan Pezzullo (2018), menawarkan kerangka konseptual yang kaya bagi evaluasi kritis ruang publik perkotaan di Indonesia.

Berdasarkan analisis wawancara dengan 17 informan yang terdiri dari pengelola, pengunjung, dan perangkat kelurahan, serta analisis konten media sosial sebanyak 120 unggahan atau komentar di Taman Bendera Pusaka hasil revitalisasi dan penggabungan Taman Langsung, Taman Ayodya, dan Taman Leuser di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, ditemukan empat kesenjangan utama antara konsep ruang publik ideal Habermas dengan realitas di lapangan.

Pertama, aspek inklusivitas telah mengalami kemajuan signifikan melalui penyediaan fasilitas yang beragam dan aksesibilitas yang ditingkatkan. Namun, dimensi inklusivitas sosial ekonomi masih memerlukan perhatian, tercermin dalam proses relokasi pedagang yang minim partisipasi (Informan 5) dan pola penggunaan ruang yang cenderung didominasi kelompok tertentu pada jam-jam tertentu (Informan 3).

Kedua, kualitas interaksi komunikatif di taman kota masih didominasi oleh aktivitas rekreatif dan olahraga, belum berkembang menjadi arena diskursus publik yang substantif tentang isu-isu pembangunan perkotaan (Informan 6, Informan 7, Informan 8). Meskipun tersedia amphitheater dan ruang ekspresi seni, pemanfaatannya untuk deliberasi publik masih terbatas.

Ketiga, partisipasi publik dalam perencanaan dan pengelolaan taman masih bersifat formalitas dan konsultatif, belum mencapai level deliberasi genuine yang memenuhi kriteria situasi tutur ideal Habermas (Informan 10, Informan 11, Informan 12, Informan 13). Model pendanaan yang melibatkan pihak swasta tanpa mekanisme partisipasi publik yang jelas berpotensi menimbulkan kolonisasi ruang publik oleh kepentingan ekonomi.

Keempat, Taman Bendera Pusaka menunjukkan indikasi dominasi kepentingan politik dan ekonomi, tercermin dalam penamaan taman yang sarat dengan pesan politik identitas (Informan 16, Informan 17) dan model pendanaan yang melibatkan kerja sama dengan pihak swasta (Informan 14), sesuai dengan diagnosis Habermas tentang kolonisasi dunia kehidupan oleh logika sistem.

Temuan dari analisis media sosial memperkuat kesimpulan ini, yaitu ruang publik digital Taman

Bendera Pusaka juga mengalami distorsi komunikasi melalui dominasi konten promosi, minimnya respons terhadap kritik publik, dan rendahnya partisipasi deliberatif netizen. Temuan ini memperkuat relevansi pemikiran Habermas dalam menganalisis komunikasi pembangunan perkotaan di Indonesia. Revitalisasi taman kota sebagai ruang fisik perlu diiringi dengan penguatan fungsi public sphere melalui program program diskursif yang terencana dan mekanisme partisipasi publik yang lebih substantif. Advokasi pembangunan yang efektif mensyaratkan ruang publik yang inklusif, bebas dominasi, dan mampu mentransformasi kepentingan privat menjadi kepentingan publik melalui diskursus yang otentik.

Untuk penelitian lanjutan, diperlukan studi jangka panjang tentang efektivitas Taman Bendera Pusaka dalam memfasilitasi deliberasi publik, analisis tentang pola penggunaan ruang oleh berbagai kelompok masyarakat, serta evaluasi tentang implementasi program program diskursif yang dapat mengubah taman dari sekadar ruang fisik menjadi ruang publik yang fungsional. Penelitian tentang dampak relokasi pedagang terhadap kehidupan ekonomi mereka dan inklusivitas ruang publik juga menjadi agenda penelitian yang penting.

REFERENSI

- [1] J. R. Cox and P. C. Pezzullo, *Environmental Communication and the Public Sphere*, 5th ed. Thousand Oaks, CA, USA: SAGE Publications, 2018.
- [2] N. Pratiwi, L. K. Ramadhanti, E. P. Handayani, and N. T. Mutmainah, "Pemetaan taman kota di Jakarta Selatan menggunakan Sistem Informasi Geografis sebagai wujud pembangunan berkelanjutan," *Jurnal Serambi Engineering*, vol. 8, no. 4, pp. 2345–2356, 2023.
- [3] M. A. Hilel, J. Parlindungan, and W. D. Purnamasari, "Persepsi pengunjung terhadap fungsi restoratif ruang terbuka hijau (Studi kasus: Tebet Ecopark)," *Jurnal Planning for Urban Region and Environment*, vol. 13, no. 2, pp. 145–158, 2024.
- [4] A. Faustina and J. Al Faraby, "Penataan ulang Taman Langsung, Kebayoran Baru menjadi ruang terbuka hijau publik dengan konsep green and inclusive," B.S. thesis, Dept. Arch., Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Indonesia, 2025.
- [5] M. Ramayuda, W. I. Rukmi, and J. Parlindungan, "Prioritas pengembangan Taman Mataram sebagai ruang publik berdasarkan persepsi pengunjung taman," *Planning for Urban Region and Environment Journal (PURE)*, vol. 14, no. 1, pp. 78–92, 2025.
- [6] Pemprov DKI Jakarta, "Siaran pers: Pemprov DKI revitalisasi kawasan Barito menjadi 'Taman Bendera Pusaka' untuk kepentingan publik dan keberlanjutan kota," *Beritajakarta.id*, 2025. [Online]. Available: <https://www.beritajakarta.id> [Accessed: Jul. 5, 2026].
- [7] "Pramono resmikan Taman Bendera Pusaka," *Antara News*, Mar. 14, 2026. [Online]. Available: <https://www.antaraneews.com/berita/5475514/pramono-resmikan-taman-bendera-pusaka> [Accessed: Jul. 5, 2026].
- [8] "Taman Bendera Pusaka hadirkan fasilitas olahraga gratis bagi masyarakat," *Antara News*, Mar. 14, 2026. [Online]. Available: <https://www.antaraneews.com> [Accessed: Jul. 5, 2026].
- [9] R. Geuss, *The Idea of a Critical Theory: Habermas and the Frankfurt School*. Cambridge, UK: Cambridge University Press, 1981.

- [10] J. Habermas, *The Structural Transformation of the Public Sphere: An Inquiry into a Category of Bourgeois Society*, T. Burger and F. Lawrence, Trans. Cambridge, MA, USA: MIT Press, 1989.
- [11] J. Habermas, *The Theory of Communicative Action, Vol. 2: Lifeworld and System*, T. McCarthy, Trans. Boston, MA, USA: Beacon Press, 1987.
- [12] E. Irawati, "Ironi revitalisasi taman kota di Kelurahan Cibubur (Studi kasus: Taman O, Kelurahan Cibubur)," B.S. thesis, Universitas Negeri Jakarta, Jakarta, Indonesia, 2025.
- [13] J. Habermas, *The Theory of Communicative Action, Vol. 1: Reason and the Rationalization of Society*, T. McCarthy, Trans. Boston, MA, USA: Beacon Press, 1984.
- [14] J. Habermas, *Moral Consciousness and Communicative Action*, C. Lenhardt and S. W. NicholSEN, Trans. Cambridge, MA, USA: MIT Press, 1990.
- [15] A. F. Fauzi, "Tindakan komunikatif di warung kopi masyarakat Mampang Jakarta Selatan," B.S. thesis, UPN Veteran Jakarta, Jakarta, Indonesia, 2024.